DOKUMEN

LAPORAN
EVALUASI RENCANA AKSI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunianya, sehingga Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di susun.

Dokumen Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Dinas PMPTSP Tahun 2024 disusun sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan/kegagalan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024.

Benteng, Desember 2024

Kepala Dinas PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan- perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya- upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah tersusunnya Laporan Realisasi Rencana Aksi untuk tahun 2024, dan tujuan disusunnya laporan Realisasi Rencana Aksi Tahun 2024 yaitu:

a. Untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024;
b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
c. Untuk memberikan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya atas capaian kinerja pada Tahun 2024;
d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung menuju terwujudnya *good*

governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3. Sistimatika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan IV Dinas Penanaman Modal Tahun 2024 seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

BAB II RENCANA AKSI : 1. Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu periode 2021- 2026, Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Rencana Aksi.

2. Menyajikan capaian realisasi rencana aksi kinerja DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu tahun 2024 yang memuat hasil capaian kinerja (sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja

BAB III PENUTUP **:** Menyajikan kesimpulan atas capaian realisasi kinerja rencana aksi Triwulan IV tahun 2024 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.

BAB II
RENCANA AKSI

2.1 Rencana Strategis Rencana Strategis (RENSTRA)

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) sebagaimana untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar serta menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021 s/d 2026 Dinas PMPTSP.

Dinas PMPTSP dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan yang menjadi tanggung jawabnya maka diperlukan langkah- Langkah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kebijkasanaan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyiapkan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas dan sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 maka Dinas PMPTSP mempunyai 2(dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi (T-1)
Sasaran : Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan (S-1)
Tujuan : Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman (T-5).
Sasaran : 1. Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6)
2. Meningkatnya Usaha Pariwisata (S-7)
3. Meningkatnya usaha Kepelabuhanan (S-8)

2.2. Indikaror Kinerja Utama (IKU)

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Dinas PMPTSP.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sesuai dengan Tujuan dan sasaran Renstra dan sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 maka Dinas PMPTSP mempunyai strategi dan arah kebijakan Serta indikator – indikator yang harus capai.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas PMPTSP Kebupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Adapun Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, startegi dan arah kebijakan adalah untuk menetapkan dan mencapai indikator sasaran, untuk mengukur indikator tersebut di jabarkan kembali menjadi indikator kinerja yang lebih menajam disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, persentase barang milik daerah yang terpelihara, Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti, Indek Akuntabilitas Kinerja dan Persentase realisasi Belanja Langsung dan Tidak langsung, yang dapat dilihat melalui table berikut:

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP	70,00 (B)
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	70,00 (B)
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	75,00%
2	Meningkatkan Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	2,00 %
		Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	9,00%
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional	15,00%
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA	6,00%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	86,00%

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. Oleh karena itu, Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, serta Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas PMPTSP Tahun 2021 – 2026. Pencapaian target pada Indikator Kinerja Utama tidak lepas dari program / kegiatan dan alokasi anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP. Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja dengan Program/Kegiatan dan Anggaran pada Dinas PMPTSP Tahun 2024 secara terinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2024

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		KET
		TARGET	ANGGARAN	
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**72,50%**	**3,392,851,000**	
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	21.000.000,-	

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024		KET
		TARGET	ANGGARAN	
b.	Administras2 Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,504,831,000.-	
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.000.000,-	
d.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	-	
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	247.305.600,-,-	
f.	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	358.288.400	
g.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	131,360,000.00	
h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	110.066.000,-	
2.	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**60%**	**10.000.000,-**	
a.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/Kota	2 dok	10.000.000,-	
3.	**Program Promosi Penanaman modal**	**32 Perusahaan**	**70.000.000,-**	
a.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 kegiatan	70.000.000,-	
4.	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**100%**	**60.180.000,-**	
a.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	60.180.000,-	
5.	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**67.000 juta rupiah**	668,117,000	
a.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	67.000 juta rupiah	668,117,000	
6.	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100%**	**19.800.000,-**	
a.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	100%	19.800.000,-	
	TOTAL		**4.295.948.00,-**	

2.4. Rencana Aksi

Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (per triwulan). Adapun Rencana Aksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	-	-	-	Sesuai

Rencana Aksi 1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota**	**1. Persentase Capaian Kinerja (%)** **2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**		
	Kegiatan 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	2 Dokumen	1 Dokumen	-	21.000.000,-	
	Sub Kegiatan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang ditetapkan	2 Dokumen				3.000.000,-	Dokumen Renja 2025, Laporan Forum OPD, dan Dokumen Renja Perubahan 2024
	Rencana Aksi : 1. Pengumpulan data, Menyusun draf Perjanjian Kinerja 2024, Casecadding 2024, Rencana Aksi 2024, dan Renja 2025		✓	-	-	-		
	2. Melaksanakan Forum OPD		✓	-	-	-		
	3. Finalisasi Perjanjian Kinerja 2024, Casecadding 2024, Rencana Aksi 2024, dan Renja 2025		✓	-	-	-		
	4. Mengimput Renja 2025 pada aplikasi		✓	-	-	-		
	Sub Kegiatan 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	3.500.000,-	Dokumen RKA SKPD
	Rencana Aksi :		✓	-	-	-		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	1. Membuat Pra RKA, menginput RKA di Aplikasi, Asistensi RKA, Reviu RKA							
	2. Finalisasi RKA		✓	-	-	-		
	Sub Kegiatan 3 'Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen	-	3.500.000,-	Dokumen RKA Perubahan SKPD
	Rencana Aksi : 1. Membuat Pra RKA Perubahan, menginput RKA Perubahan di Aplikasi, Asistensi RKA Perubahan, Reviu RKA Perubahan		-	✓	-	-		
	2. Finalisasi RKA Perubahan		-	-	✓	-		
	Sub Kegiatan 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	3.500.000,-	Dokumen DPA SKPD
	Rencana Aksi : Membuat Pra DPA, menginput DPA di Aplikasi, Asistensi DPA , Reviu DPA		✓	-	-	-		
	Finalisasi DPA Perubahan		✓	-	-	-		
	Sub Kegiatan 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1 Dokumen	-	3.500.000,-	Dokumen DPA Perubahan SKPD
	Rencana Aksi : Membuat Pra DPA Perubahan, menginput DPA Perubahan di Aplikasi, Asistensi DPA Perubahan, Reviu DPA Perubahan		-	✓	-	-		
	Finalisasi DPA Perubahan		-	-	✓	-		
	Sub Kegiatan 6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	7 Dokumen	-	-	-	2.000.000,-	Dokumen Capaian Kinerja

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD							
	Rencana Aksi : 1. Pengumpulan data, penyusunan daraf LAKIP 2024, LKPJ 2024, LPPD 2024, dan Laporan Evaluasi Internal 202 per triwulan		✓	✓	✓	✓		
	2. Asistensi LAKIP 2024, LKPJ 2024, dan LPPD 2024		✓	-	-	-		
	3. Finalisasi LAKIP 2024, LKPJ 2024, LPPD 2024, dan Laporan Evaluasi Internal 2024 per triwulan		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 7 Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	-	-	-	2.000.000,-	Dokumen SAKIP
	Rencana Aksi : 1. Mengumpulkan Data Evaluasi Kinerja 2023		✓	-	-	-		
	2. Menyetor Dokumen Evaluasi Kinerja 2023 kepada Inspektorat Daerah		✓	-	-	-		
	3. Melakukan Revisi Dokumen Evaluasi kinerja 2023 atas Review Inspektorat Daerah		✓	-	-	-		
	4. Mengimput Dokumen Evaluasi Kinerja 2023 pada Aplikasi		✓	-	-	-		
	Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia						
	Sub Kegiatan 1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	2.504.831.000,00	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN							
	Rencana Aksi: 1. Mengambil ampra gaji pada Bidang Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		✓	✓	✓	✓		
	2. Membuat SPM dan SPP kekurangan Gaji		✓	✓	✓	✓		
	3. Membuat daftar potongan gaji		✓	✓	✓	✓		
	4. Membuat SPM dan SPP Gaji		✓	✓	✓	✓		
	5. Membuat Konsep kenaikan gaji berkala (KGB) ASN		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 2 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen				3.000.000,-	
	Rencana Aksi: 1. Pengumpulan data, penyusunan draf Laporan Keuangan		✓	-	-	-		
	2. Asistensi LK dan Finalisasi LK		✓	-	-	-		
	Sub Kegiatan 3 penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		1 Dokumen		1 Dokumen	3.000.000,-	
	Rencana Aksi: 1. Pengumpulan data, penyusunan draf Laporan Keuangan Semesteran		-	✓	-	-		
	2. Asistensi LK dan Finalisasi LK Semesteran		-	✓	-	-		
	Sub Kegiatan 4 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4.000.000,-	
	Rencana Aksi:		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	1. Pengumpulan data, penyusunan draf Laporan RFK							
	2. Asistensi RFK dan Finalisasi RFK		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota**	**. Persentase Capaian Kinerja (%)** **. Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**		
	Kegiatan 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	2 Dokumen	1 Dokumen	-	10.000.000,-	
	Sub Kegiatan 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**						
	Rencana Aksi: . Pengumpulan data							
	. Pengimputan data pada aplikasi							
	. Melakukan Asistensi							
	. Finalisasi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
	Sub Kegiatan 2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,-	Dokumen Rekonsiliasi Aset
	Rencana Aksi : . Melakukan Penyusunan Rekonsiliasi Barang		✓	✓	✓	✓		
	. Melakukan Penyusunan Rekonsiliasi Persediaan Barang		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,-	Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Rencana Aksi : . Mengumpulkan bahan KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		
	. Melakukan Penyusunan KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		
	. Melakukan Asistensi		✓	✓	✓	✓		
	. Memfinalisasi dokumen KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		

Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat**	Indeks kepuasan layanan non SPM urusan Penanaman Modal	**-**	**-**	**-**	**81,38 %**

Rencana Aksi 2

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota**	**3. Persentase Capaian Kinerja (%)** **4. Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**		
	Kegiatan 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	2 Dokumen	1 Dokumen	-	10.000.000,-	
	Sub Kegiatan 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**					3.000.000	
	Rencana Aksi: 1. Pengumpulan data							
	2. Pengimputan data pada aplikasi							
	3. Melakukan Asistensi							

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	4. Finalisasi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
	Sub Kegiatan 2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,-	Dokumen Rekonsiliasi Aset
	Rencana Aksi : 1. Melakukan Penyusunan Rekonsiliasi Barang		✓	✓	✓	✓		
	2. Melakukan Penyusunan Rekonsiliasi Persediaan Barang		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,-	Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Rencana Aksi : 1. Mengumpulkan bahan KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		
	2. Melakukan Penyusunan KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		
	3. Melakukan Asistensi		✓	✓	✓	✓		
	4. Memfinalisasi dokumen KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		

Sasaran ke 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kerjasama investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)				28.297
		Nilai Investasi PMA ($ Juta)				1.164

Rencana aksi 3

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali		
	Kegiatan 1. Penyelenggraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Penerimaan Misi Penanaman Modal	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	70.000.000	
	Sub Kegiatan 1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	70.000.000	Dokumen Hasil KegiatanPromosi Penanaman Modal Kabupaten /Kota
	. Menyususun KAK Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi		✓					

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	. Menyususn SK TIM Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi		✓					
	. Menyiapkan Rapat TIM Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi			✓	✓			
	. Pengumpulan Bahan Dokumen Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi			✓	✓	✓		
	. Penyusunan Dokumen Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi			✓	✓	✓		
	. Melaksanakan Asistensi			✓	✓	✓		
	. Finalisasi Dokumen Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi			✓	✓	✓		
2	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase potensi untuk peluang Investasi Daerah (%)**	**60%**	**60%**	**60%**	**60%**	**10.000.000**	
	Kegiatan 1 Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	**Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah**	**15 Perusahaan**				**10.000.000**	
	Sub Kegiatan 1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian	**Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**10.000.000**	Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	**Kemudahan Penanaman Modal**						Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	Rencana Aksi : . Pengumpulan bahan Perda Pemberian Fasiltas/Insentif Penanaman Modal		✓	✓	✓	✓		
	. Penyusunan Perda Pemberian Fasiltas/Insentif Penanaman Modal		✓	✓	✓	✓		
	. Melakukan Asistensi		✓	✓	✓	✓		
	. Finalisasi Perda Pemberian Fasiltas/Insentif Penanaman Modal		✓	✓	✓	✓		
1	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)**	**67.000**				668,117,000	
	Kegiatan 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)**	**67.000**				668,117,000	
	Sub Kegiatan 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	**Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal**	**204 pelaku usaha**				385,466,000	**Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Rencana aksi :							
	. Membuat SK Tim Terpadu , KAK Terkait Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		✓	✓				
	. Membuat SK Internal Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha		✓	✓				
	. Melakukan rapat untuk Menentukan lokasi Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan		✓	✓	✓	✓		
	. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait sehubungan dengan akan dilaksanakannya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Sosialisasi implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha		✓	✓	✓	✓		
	. Mengidentifikasi Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku uisaha dalamm merealisasikan kegiatan usahanya		✓	✓	✓	✓		
	. Menyelesaikan Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku uisaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 2 Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	**Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan**	**13 Usaha/Kegiatan**				**188,434,000.00**	Berapa Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
	. Rencana Aksi Membuat SK, KAK Terkait Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		✓	✓				
	. Melaksanakan Analisa dan Verifikasi data, Profil		✓	✓				

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha							
	. Melaksanakan Inspeksi Lapangan		✓	✓	✓	✓		
	. Melaksanakan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha		✓	✓	✓	✓		

Sasaran 4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive	Persentase izin usaha dan investasi yang dikeluarkan				100%

Rencana Aksi 4

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang di terbitkan (%)	100%	100%	100%	100%	60,180,000	
	Kegiatan 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Perizinan dan Non Perizinan	1400 izin				60,180,000	
	Sub Kegiatan 1 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4 Pelaku usaha			1 pelaku usaha	19,380,000	
	Rencana aksi :		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	1. Menerima masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi dan pengaduan							
	2. Mendaftarkan identitas masyarakat		✓	✓	✓	✓		
	3. Menyelesaikan permasalahan sesuai tingkat aduan dan konsultasinya		✓	✓	✓	✓		
	4. Membuat Laporan hasil konsultasi dan aduan		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Penanaman Modal	**Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal**	**13 kegiatan usaha**			**13 kegiatan usaha**	**1.800.000**	Dokumen Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal
	Rencana Aksi : 1. Penyusunan rencana pemantauan Usaha Beresiko Tinggi dan Menengah Tinggi		✓	✓	✓	✓		
	2. Menyusun Personil yang akan melakukan pemantauan		✓	✓	✓	✓		
	3. Pelaksanaan Pemantauan		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	4. Laporan Hasil Pemantauan Pemenuhan Komitmen		✓	✓	✓	✓		
2.291 pelaku usaha	**Sub Kegiatan 3 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	**Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	**1400 pelaku usaha**	**pelaku usaha**	**pelaku usaha**	**2.291 pelaku usaha**	**39.000.000**	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin
	Rencana Aksi : 1. Menerbitkan Registrasi Pemohon Izin		✓	✓	✓	✓		
	2. Melakukan Proses Berkas		✓	✓	✓	✓		
	3. Menerbitkan Izin		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	**Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah**	**-**				**-**	
	Rencana Aksi: 1. Menerima permohonan fasilitas / Insentif Daerah Daerah dari Pengusaha		✓	✓	✓	✓		
	2. Mengkoordinasikan permohonan kepada tim penilai pemberian fasilitas dan Insentif Daerah		✓	✓	✓	✓		
	3. Menyampaikan ke pemohon terkait hasilpenilaian kelayakan pemberian fasilitas / pemberian insentif		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**19.800.000**	
	Kegiatan 1 **Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**19.800.000**	
	Sub Kegiatan 1 **Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis terintegrasi secara elektronik**	**Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kab/kota**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**19.800.000**	Laporan pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan sistem informasi
	Rencana Aksi : 1. Menerima dan mencatat permintaan Data sektor baik secara rutin perbulan ke OPD maupun permintaan informasi izin bagi yang membutuhkan		✓	✓	✓	✓		
	2. Memberikan data penerbitan izin setiap bulannya kepada instansi teknis		✓	✓	✓	✓		
	3. Menginformasikan data terkait perizinan melalui website resmi		✓	✓	✓	✓		

2.5. Capaian Kinerja

Adapun hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Triwulan IV tahun 2024 seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Realisasi Capaian Rencana Aksi Sasaran Strategis tahun 2024

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)	Ket.
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
	Dinas PMPTSP					
	Urusan Penanaman Modal					
	1. Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	%	70	60,77	86,81%	
	2. Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100 %	
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75	81,38	108,5%	
	4. Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	%	9	16	177,8%	4/25 x 100 = 16,00 %
	5. Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional	%	15	-59,50	0	27.297.347.421-67.404.900/67.404.900 X100% = -59,50 Terdapat investor berskala nasional di kabupaten kepulauan selayar tidak melaporkan LKPM nya
	6. Persentase peningkatan nilai investasi PMA	%	6	-86,89	0	1.164.337.725-8.881.471.537/8.881.471.537 X100% =-86,89 Terdapat investor asing di kabupaten kepulauan selayar tidak melaporkan LKPM nya
	7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	%	86,00	88,15	102,5%	

Sumber Data: Dinas PMPTSP , Desember 2024

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Terlihat bahwa rata- rata target melebihi realisasi capaiannya, seperti Laporan Keuangan OPD sesuai SAP ini ditunjang dengan adanya penggunaan aplikasi SIPD, FMIS dan Manca yang terintegrasi. Adapun persentase realisasi capaian nilai investasi PMA dan nilai investasi PMDN ini mengalami penurunan karena banyaknya pelaku usaha/investor yang tidak melaporkan LKPMnya sehinga target capaian tidak terealisasi. Pada kegiatan ini sudah melaksanakan bimbingan teknis tata cara pelaporan lkpm di aplikasi tetapi masih banyak investor yang kurang memiliki kesadaran untuk melaporkan LKPM nya.

2.6. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut ini:

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Urusan Bidang Penanaman Modal	Dinas PMPTSP		**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**70,28%**	**60,77 %**			
					88,00%	**94,57%**			
					Rp. 3,392,851,000	**Rp. 3,168,296,648**	**73,76 %**		
				a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**			
					21.000.000,-	**18.465.200,-**	**87,92%**		
				1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
					3.000.000,-	2,481,500.00	82,72 %		
				2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					3.500.000,-	3,319,400.00	94,84 %		
				3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					3.500.000,-	3,388,000.00	96,80 %		
				4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					3.500.000,-	3,265,000.00	93,29 %		
				5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					3.500.000,-	3,159,400.00	90,27%		
				6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
					2.000.000,-	1,484,500.00	68,37 %		
				7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			
					2.000.000,-	1,367,400.00	97,01 %		
				b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**			
					2,504,831,000.00	**2,342,446,491.00**	**93.52**		
				1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan			
					2.504.831.000	2.342.446.491	93,52%		
				2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					3,000,000.00	2,602,600.00	86.75%		
				3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
					3,000,000.00	2,802,400.00	93.41%		
				4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen			
					4,000,000.00	3,264,600.00	81.62 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**100%**	**100%**			
					10.000.000,-	**8,912,300.00**	**89,12%**		
				1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
					3,000,000.00	2,430,500.00	81.02 %		
				2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
					3,000,000.00	2,843,500.00	94.78 %		
				3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
					4,000,000.00	3,638,300.00	90.96 %		
				d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**100%**			
					247.305.600,-	**246.510.294,-**	**99.68%**		
				1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	2 Paket			
					8,517,600.00	8,096,600.00	95.06		
				2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Dokumen	5 Dokumen			
					4,020,000.00	3,900,000.00	97.01 %		
				3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan			
					234,768,000.00	234,513,694.00	99.89 %		
				e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**100%**			
					131,360,000.00	**107,610,000.00**	**82.07%**		
				1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	4 Unit			
					131,360,000.00	107,610,000.00	82.07%		
				f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**			
					358.288.400	**331.160.073**	**98,31**		
				1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Laporan	3 Laporan			
					141,748,000.00	119,207,673.00	84.10%		
				2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 Laporan	3 Laporan			
					216,540,400.00	211,952,400.00	97.88%		
				g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**27 unit**	**27 unit**			
					110.066.000,-	**104.522.690,-**	**94,96%**		
				1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	20 Unit	20 Unit			
					17,560,000.00	15,922,000.00	90.67%		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 Unit	5 Unit			
					46,790,000.00	46,720,000.00	99.85%		
				3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	-		
					-	-	-		
				4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit			
					45,716,000.00	41,880,690.00	91.61%		
				Program Promosi Penanaman Modal	**32 investor**	**4 investor**			
					70,000,000	**59,531,500**	**85,05 %**		
				Kegiatan Penyelenggraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	2 kegiatan	2 Kegiatan			
					70,000,000	59,531,500	85,05 %		
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
					70,000,000	59,531,500	85,05 %		
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**67.000**	**28.461**			
					668,117,000	**425,673,039**	**63,71 %**		
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	67.000	28.461			
					668,117,000	425,673,039	63,71 %		
				1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	204 Pelaku Usaha	284 Pelaku Usaha			
					385,466,000	309,469,139	80,28%		
				2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	13 Kegiatan Usaha	101 Kegiatan Usaha			
					188,434,000.00	115,413,900.00	61,25%		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				3) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	94,217,000.00	790,000.00	0,84%		
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**60%**	**60%**		Rendahnya realisasi keuangan disebabkan oleh keterbatasan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan belanja kegiatan	Melakukan perencanaan yang matang di awal tahun agar belanja kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu
					10,000,000	**4,604,200**	**46,04 %**		
				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15 perusahaan	0 perusahaan			
					10,000,000	4,604,200	46,04 %		
				1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen			
					10,000,000	4,604,200	46,04 %		
				Program pelayanan Penanaman Modal	**100%**	**100%**			
					60,180,000	**52,279,069**	**86,87%**		
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1400 izin	2.292 Izin			
					60,180,000	52,279,069	86,87%		
				1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	1400 Pelaku Usaha	2.291 Pelaku Usaha			
					39.000.000	32,538,569.00	83,43%		
				2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	13 Kegiatan Usaha	13 Kegiatan Usaha			
					1,800,000	1,800,000	100 %		
				3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	4 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha			
					19,380,000	17,940,500	92,57%		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	-		
					0,-	0,-	0 %		
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**100%**	**100%**			
					19.800.000	**19.086.000**	**96,39 %**		
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
					19.800.000	19.086.000	96,39 %		
				1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen			
					19.800.000	19.086.000	96,39%		

Sumber: RFK bulan Desember Dinas PMPTS

Tabel 2.6 di atas menunjukkan realisasi anggaran tahun 2023 dari 33 sub kegiatan sebesar **Rp. 3.729.470.456,-**atau **86,82%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 4.295.948.000,-** dengan demikian terdapat sisa pagu sebesar **Rp. 566.477.544,-**. Meskipun persentase serapan anggaran masih tergolong tinggi. Besaran angka tersebut disebabkan karena realisasi anggaran dari beberapa kegiatan yang tidak mencapai 100% utamanya pada kegiatan pengendalian penanaman modal yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik. Banyak nya kegiatan yang tidak terealisasi seperti belanja ATK dikarenakan adanya perbedaan harga di E-Katalog dengan Sipd/pada DPA sehingga tidak bisa terealisasi 100%

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan pencapaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentunya tidak terlepas daripada faktor pendukung dan faktor penghambat serta faktor intenal dan eksternal terhadap realisasi capaian rencana aksi yang telah dicapai. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung berdasarkan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Faktor Pendukung dan Penghambat realisasi capaian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	Dibutuhkan perencanaan anggaran yang lebih baik agar pemenuhan sarana dan prasarana serta komunikasi MPP dapat dilengkapi guna kenyamanan pengunjung	1. Sarana dan prasarana MPP yang belum mendukung 2. Belum optimal proses pelayanan PTSP pada pelayanan perizinan sesuai dengan SOP sebab tidak semua Tim Teknis bergabung di MPP setiap hari kerja 3. Keterbatasan anggaran
2	**Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah**	**Laporan Keuangan OPD sesuai SAP**	1. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur	1. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini 2. Keterbatasan anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
3	**Meningkatnya Kerjasama investasi**	**Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)** **Nilai Investasi PMA ($ Juta)**	Melakukan revisi terhadap regulasi yang mengarah kepada pemberian insentif kepada investor	1. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi 2. Tidak semua investor membuat laporan /LKPM melalui aplikasi OSS
4	**Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive**	**Persentase izin usaha dan investasi yang dikeluarkan**	1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu	1. Sarana dan prasarana MPP yang belum mendukung 2. Belum optimal proses pelayanan PTSP pada pelayanan perizinan sesuai dengan SOP sebab tidak semua Tim Teknis bergabung di MPP setiap hari kerja

BAB III

PENUTUP

Rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2024, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/hembatan yang timbul.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan professional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Benteng, Desember 2024

Kepala Dinas PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022